

EVALUASI EFEKTIVITAS STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SEKOLAH

Harol R. Lumapow¹, Shelty D.M Sumual², Ria Angelia Tumakaka³, Anastasya Milanisti M. Runtulalo⁴

harolrlumapow@unima.ac.id¹, sheltysumual@unima.ac.id², riatumakakaa@gmail.com³,
tasyamillanisti@gmail.com⁴

Pascasarjana Universitas Negeri Manado

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas standar pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sekolah, dengan fokus pada bagaimana alokasi dan pemanfaatan dana sesuai standar nasional berdampak terhadap mutu layanan pendidikan. Latar belakang studi ini didasarkan pada pentingnya peran pembiayaan dalam menunjang berbagai aspek pendidikan, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, serta pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka dari berbagai jurnal ilmiah dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun standar pembiayaan telah ditetapkan secara nasional, implementasinya di tingkat daerah dan sekolah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pencairan dana, ketidaksesuaian kebutuhan sekolah dengan alokasi yang diterima, serta kurangnya kapasitas manajerial dalam pengelolaan anggaran. Namun demikian, sekolah-sekolah yang mampu mengelola dana secara efektif menunjukkan peningkatan dalam aspek fasilitas belajar, motivasi guru, dan hasil belajar siswa. Studi ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkala terhadap standar pembiayaan yang ada, peningkatan kapasitas pengelola sekolah, serta penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi anggaran. Dengan demikian, standar pembiayaan pendidikan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi pendorong nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Pembiayaan Pendidikan, Kualitas Sekolah, Anggaran Pendidikan.

ABSTRACT

This study seeks to assess the effectiveness of education financing standards in enhancing school quality, particularly examining how the allocation and utilization of funds in accordance with national standards influence the quality of educational services. The foundation of this study rests on the critical role of financing in supporting various facets of education, including infrastructure, human resources, and curriculum development and learning activities. Employing a qualitative descriptive approach, this study utilizes a literature review method drawn from diverse scientific journals and policy documents. The findings reveal that, despite the establishment of national financing standards, their implementation at regional and school levels encounters numerous challenges, such as delays in fund disbursement, misalignment between school needs and received allocations, and insufficient managerial capacity in budget management. Nevertheless, schools that effectively manage funds demonstrate improvements in learning facilities, teacher motivation, and student learning outcomes. This study advocates for the periodic evaluation of existing financing standards, enhancement of school managers' capacities, and the fortification of budget monitoring and transparency mechanisms. Consequently, education financing standards serve not only as administrative tools but also as significant catalysts for elevating the quality of education in Indonesia.

Keywords: Educational Financing, School Excellence, Education Budgeting.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor kunci dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam konteks Indonesia, kualitas pendidikan masih menjadi

tantangan besar, khususnya dalam hal pemerataan dan efektivitas pembiayaan. Pemerintah telah mengembangkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai kerangka acuan untuk menjamin mutu pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan. Salah satu dari delapan komponen SNP adalah Standar Pembiayaan Pendidikan, yang berfungsi untuk memastikan kecukupan, efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana pendidikan guna mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Standar Pembiayaan Pendidikan mencakup dua aspek utama, yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi mencakup pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, serta modal kerja tetap. Sementara itu, biaya operasional mencakup biaya personalia (gaji dan tunjangan) serta biaya nonpersonalia (kegiatan belajar mengajar, pemeliharaan, dan pengelolaan sekolah) (Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022). Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, peningkatan anggaran tersebut belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap kualitas sekolah secara merata di seluruh Indonesia (Hidayat, 2023).

Menurut Ningsih dan Hariani (2021), masalah utama dalam efektivitas pembiayaan pendidikan di Indonesia bukan hanya pada kuantitas anggaran, tetapi pada kualitas perencanaan, distribusi, dan pengelolaan dana. Dalam banyak kasus, dana yang sudah dialokasikan tidak sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran dan peningkatan mutu sekolah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kapasitas manajerial kepala sekolah, lemahnya sistem pengawasan, serta keterbatasan dalam pengumpulan data kebutuhan sekolah secara akurat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Fadhilah (2022), ditemukan bahwa sekolah-sekolah dengan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan (*need-based budgeting*) dan pengelolaan keuangan yang partisipatif cenderung menunjukkan peningkatan pada indikator-indikator mutu pendidikan seperti hasil belajar siswa, kehadiran guru, serta kelengkapan sarana belajar. Sebaliknya, sekolah yang hanya mengikuti skema penganggaran rutin tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan menunjukkan stagnasi bahkan penurunan dalam capaian mutu. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas standar pembiayaan sangat berkaitan dengan kemampuan sekolah dalam mengelola dana secara kontekstual dan strategis.

Selain itu, Nurhasanah (2020) menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Ia menekankan bahwa laporan keuangan sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara substantif, yaitu sejauh mana dana yang digunakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang belum memiliki sistem pelaporan yang memadai dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini menghambat proses evaluasi efektivitas pembiayaan yang berbasis bukti.

Dalam konteks otonomi daerah, terdapat ketimpangan kapasitas fiskal antar wilayah yang berimplikasi pada perbedaan kualitas layanan pendidikan. Pemerintah daerah dengan pendapatan terbatas cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi standar pembiayaan yang ditetapkan secara nasional. Menurut Putra (2021), hal ini memperlebar kesenjangan mutu antar sekolah, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Evaluasi terhadap efektivitas standar pembiayaan pendidikan harus mempertimbangkan kondisi ini agar dapat menghasilkan rekomendasi yang inklusif dan adaptif terhadap realitas lokal.

Permasalahan efektivitas juga terkait dengan keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang menyebabkan terganggunya kegiatan pembelajaran di banyak sekolah. Dalam penelitian oleh Wahyuni dan Puspitasari (2022), ditemukan bahwa keterlambatan ini berdampak langsung pada kegiatan rutin sekolah seperti pengadaan bahan

ajar, pembayaran honor guru honorer, dan pemeliharaan sarana prasarana. Dengan demikian, efektivitas pembiayaan tidak hanya diukur dari jumlah dana yang tersedia, tetapi juga dari ketepatan waktu dan ketepatan sasaran dalam penyalurannya.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, evaluasi terhadap efektivitas Standar Pembiayaan Pendidikan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai keberhasilan kebijakan dari sisi administratif dan keuangan, tetapi juga dari sisi dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di tingkat sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Standar Pembiayaan Pendidikan telah diimplementasikan secara efektif dan berkontribusi nyata terhadap mutu sekolah. Fokus penelitian meliputi aspek perencanaan anggaran, pengelolaan dana, partisipasi pemangku kepentingan, serta pengaruhnya terhadap indikator-indikator mutu pendidikan.

Diharapkan hasil evaluasi ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih kontekstual, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Selain itu, evaluasi ini juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas sekolah dalam mengelola keuangan secara profesional dan akuntabel, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara lebih optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penulis menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal ilmiah, dan regulasi pendidikan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik kolaboratif dalam konteks tata kelola pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi terhadap efektivitas standar pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sekolah merupakan langkah strategis dalam menilai apakah mekanisme alokasi dan penggunaan dana pendidikan telah sesuai dengan tujuan peningkatan mutu. Dalam konteks Indonesia, Standar Pembiayaan Pendidikan merupakan salah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi tolok ukur dalam menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan. Namun, meskipun anggaran pendidikan telah mengalami peningkatan secara kuantitatif, belum seluruhnya berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara merata (Hidayat, 2023).

1. Efektivitas Alokasi dan Pemanfaatan Dana

Salah satu indikator efektivitas standar pembiayaan adalah sejauh mana dana pendidikan dialokasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan mutu layanan pendidikan. Menurut Ningsih dan Hariani (2021), banyak sekolah belum menerapkan pendekatan penganggaran berbasis kebutuhan (*needs-based budgeting*), sehingga pengalokasian anggaran cenderung tidak mencerminkan prioritas pendidikan yang aktual. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara rencana kegiatan sekolah dengan kebutuhan riil yang mendesak, seperti pengadaan sarana pendukung pembelajaran atau pelatihan guru.

Selanjutnya, pemanfaatan dana juga sering kali tidak terkelola secara efisien. Banyak sekolah yang menggunakan dana BOS atau sumber pembiayaan lain untuk kegiatan administratif semata, alih-alih fokus pada perbaikan kualitas proses pembelajaran. Dalam studi yang dilakukan oleh Nurhasanah (2020), ditemukan bahwa pengelolaan keuangan sekolah masih sangat bergantung pada kepala sekolah, tanpa pelibatan optimal dari komite sekolah atau guru dalam proses perencanaan dan evaluasi anggaran. Ini memperlambat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

2. Keterlambatan dan Ketidaktepatan Penyaluran Dana

Efektivitas pembiayaan pendidikan juga dipengaruhi oleh ketepatan waktu penyaluran dana. Wahyuni dan Puspitasari (2022) mengemukakan bahwa keterlambatan pencairan dana BOS berdampak pada terganggunya aktivitas operasional sekolah, seperti pembayaran honor guru tidak tetap, pemeliharaan fasilitas, dan pembelian bahan ajar. Ketidaktepatan waktu ini menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan program kerja sekolah yang telah dirancang sebelumnya.

Di sisi lain, ketidaktepatan sasaran penyaluran dana juga masih terjadi. Ada sekolah yang menerima dana dalam jumlah besar meskipun kondisi sekolah tidak membutuhkan pembiayaan sebesar itu, sementara sekolah lain yang sangat membutuhkan justru mendapatkan dana yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem distribusi dana pendidikan belum sepenuhnya berbasis pada data kebutuhan dan kondisi objektif di lapangan (Putra, 2021).

3. Kesenjangan Pembiayaan Antarwilayah

Ketimpangan antarwilayah dalam hal pembiayaan pendidikan masih menjadi isu yang signifikan. Wilayah dengan kapasitas fiskal tinggi, seperti kota-kota besar, mampu menyediakan pembiayaan tambahan dari APBD untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Sebaliknya, daerah tertinggal sering kali hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang kadang tidak mencukupi untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (Sari & Fadhilah, 2022).

Menurut Putra (2021), kesenjangan ini disebabkan oleh lemahnya desain kebijakan afirmatif yang memperhatikan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi daerah. Akibatnya, kualitas sekolah di daerah tertinggal tetap rendah meskipun telah menerima alokasi dana BOS secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan tidak hanya terkait dengan jumlah dana, tetapi juga relevansi kebijakan pembiayaan terhadap kondisi lokal.

4. Keterkaitan antara Pembiayaan dan Mutu Sekolah

Secara teoritis, peningkatan pembiayaan seharusnya berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan, seperti perbaikan sarana, peningkatan kompetensi guru, dan penguatan manajemen sekolah. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara pembiayaan dan mutu tidak selalu linier. Hidayat (2023) mencatat bahwa ada sekolah yang mendapatkan anggaran besar, tetapi tetap menunjukkan performa rendah dalam aspek pembelajaran. Sebaliknya, ada sekolah dengan anggaran terbatas namun menunjukkan mutu yang baik karena pengelolaan yang efektif dan kolaboratif.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajemen sekolah. Kepala sekolah yang memiliki kemampuan kepemimpinan dan perencanaan strategis cenderung mampu mengoptimalkan penggunaan dana untuk kegiatan yang berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, pelatihan manajemen keuangan dan kepemimpinan sangat penting untuk mendukung efektivitas pembiayaan.

5. Peran Transparansi dan Akuntabilitas

Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan. Nurhasanah (2020) menegaskan bahwa keterbukaan informasi terkait penggunaan dana publik dapat mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Sayangnya, banyak sekolah belum menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis digital yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Sebagai respon terhadap hal ini, pemerintah perlu mendorong implementasi sistem informasi keuangan pendidikan yang terintegrasi, yang memungkinkan pelaporan real-time,

akuntabel, dan dapat diverifikasi oleh berbagai pihak. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.

KESIMPULAN

Efektivitas standar pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sekolah sangat ditentukan oleh aspek perencanaan berbasis kebutuhan, ketepatan penyaluran dana, kapasitas manajerial sekolah, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Untuk menjadikan pembiayaan sebagai instrumen yang benar-benar meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan perbaikan dalam sistem perencanaan, pengawasan, dan afirmasi kebijakan yang responsif terhadap kondisi lokal. Pembiayaan bukan semata tentang jumlah, tetapi tentang bagaimana dana tersebut diolah menjadi investasi bermakna bagi masa depan pendidikan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, O., Sonia, N. R., Darmawan, I. P. A., Abbas, D. S., Saputro, A. N. C., Poltak, H., ... & Hasbi, I. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan.
- Badrudin, B., Setiana, R., Fauziyyah, S., & Ramdani, S. (2024). Standarisasi Pendidikan Nasional. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1797-1808.
- Hidayat, R. (2023). Efektivitas Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Pendidikan*, 5(2), 101–113
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Laporan Kinerja Pendidikan Nasional 2020/2021. Jakarta: Kemendikbud
- Musnaeni, M., ABIDIN, S., & PURNAMAWATI, P. (2022). Pentingnya manajemen strategi Dalam meningkatkan kualitas pendidikan. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(2), 98-104
- Ningsih, L., & Hariani, D. (2021). Analisis Efektivitas Penggunaan Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Evaluasi*, 9(1), 45–58
- Permendikbudristek No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan.
- Putra, A. D. (2021). Ketimpangan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Mutu Pendidikan di Indonesia Timur. *Jurnal Pemerataan Pendidikan*, 4(1), 22–37